



Pengajuan Keringanan PBB hingga Juni

YOGYAKARTA—Seluruh wajib pajak di Kota Yogyakarta bisa mengajukan permohonan keringanan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). Pengajuan keringanan akan dilayani hingga akhir Juni mendatang.

"Pengajuan keringanan pembayaran PBB kami layani hingga 30 Juni. Jika lewat, kami tidak bisa memprosesnya," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Kota Yogyakarta Kadri Renggono kemarin.

Pemohonan pengurangan atau keringanan pembayaran PBB dapat diakses oleh seluruh wajib pajak, termasuk wajib pajak yang memiliki bangunan cagar budaya, veteran, dan warga kurang mampu. Besaran keringanan pajak yang diberikan bervariasi, yaitu antara 10-75% dari nilai ketetapan pajak bagi veteran dan 25-35% bagi pemilik bangunan cagar budaya. "Selain keringanan, khusus wajib pajak pemilik bangunan cagar budaya juga akan mendapat insentif yang akan diberikan sesuai membayar pajak," ujarnya.

Untuk tahun pajak 2017, Pemkot Yogyakarta menerbitkan 93.430 lembar surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) dengan total ketetapan PBB sebesar Rp79,5 miliar. SPPT PBB tersebut langsung didistribusikan melalui wilayah dan diharapkan sudah dapat diterima oleh seluruh wajib pajak paling lambat 31 Maret mendatang.

Ke Hal 10

Pengajuan Keringanan PBB hingga Juni

(Daerah Hal 9

Meskipun total ketetapan PBB tahun ini mencapai Rp79,5 miliar, Pemkot hanya memasang target PBB sebesar Rp57,8 miliar. "Selisihnya memang cukup besar, tapi target ini kami sesuaikan dengan realisasi PBB tahun lalu sekitar Rp56,4 miliar," ujarnya.

Guna mengejar target, sejumlah upaya dilakukan diantaranya dengan mengencangkan sosialisasi, membentuk tim penagihan PBB, dan membuka akses pembayaran PBB yang mudah dijangkau wajib pajak melalui BPD DIY, kantor pos, dan aplikasi telepon seluler.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Titik Sulastru berharap seluruh SPPT PBB bisa tersampaikan ke wajib pajak tepat waktu. Menurut dia, sektor pajak yang sudah dikelola langsung oleh Pemkot Yogyakarta sejak 2012 berdampak langsung terhadap program pembangunan daerah.

©ristuhanafi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005